

## BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Analisis Pelayanan Kesehatan Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, sebagian besar responden memiliki sikap negatif, ketersediaan sarana dan prasarana pada pelayanan kesehatan hipertensi hampir seluruhnya tersedia, sebagian besar dukungan petugas kesehatan negatif terhadap pelayanan kesehatan hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan.
2. Terdapat hubungan antara sikap masyarakat penderita hipertensi dan dukungan petugas kesehatan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi. Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat penderita hipertensi dan ketersediaan sarana dan prasarana dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan.
3. Komponen masukan (*input*) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan ditemukan bahwa belum memadainya ketersediaan SDM, dan dana yang dianggarkan dalam program kegiatan terbatas. Ketersediaan sarana dan prasarana telah memadai dan berfungsi dengan baik. Metode dilakukan melalui upaya pencegahan dan pengendalian, yaitu melalui kegiatan Posbindu, upaya promosi kesehatan, skrining untuk deteksi dini faktor

risiko, perlindungan khusus, upaya pengendalian masyarakat dan upaya pengendalian individual di Puskesmas serta dilakukannya pencatatan dan pelaporan. Kebijakan mengacu pada peraturan pusat dan kebijakan daerah, yaitu Permenkes No. 71 Tahun 2015, Permenkes RI No. 4 Tahun 2019, Renstra Dinas Kesehatan dan RKPD Kota Padangsidempuan.

4. Komponen proses (*process*) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan ditemukan bahwa perencanaan dilakukan mengikuti prosedur yang disediakan pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan penyusunan anggaran program dan kegiatan, yaitu dokumen RKA, RKPD dan Renstra Dinas Kesehatan. Pengorganisasian dilaksanakan melalui pola struktur organisasi, dengan adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja. Pelaksanaan dilakukan dengan menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) melalui kegiatan Posbindu dan menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas. Monitoring & evaluasi dilaksanakan setiap triwulan. Pengelola program di Dinas kesehatan melakukan monitoring & evaluasi ke seluruh Puskesmas di Kota Padangsidempuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Keluaran (*output*) dalam pelayanan kesehatan hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan menunjukkan hasil dengan capaian rendah.

## 7.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Kesehatan harus lebih memperhatikan dan mengkaji ulang kebutuhan dan pendistribusian SDM di Puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah sesuai kebutuhan serta keterampilan dan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
2. Dalam upaya menguatkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, Dinas Kesehatan harus konsisten melakukan advokasi dengan kepala daerah dan legislatif serta menjalin kemitraan dengan lintas sektor terkait. Advokasi dan koordinasi juga perlu dilakukan untuk menerbitkan undang-undang, peraturan khusus ataupun regulasi yang mendukung dalam melakukan intervensi terhadap perbaikan hasil capaian program dan kegiatan dimasa mendatang.
3. Dinas Kesehatan dan jaringannya perlu menguatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral untuk menggerakkan masyarakat agar lebih peduli dan bersedia berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi.
4. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu lebih memperhatikan hasil monitoring & evaluasi terhadap intervensi pelayanan kesehatan hipertensi, memunculkan setiap kendala untuk menemukan strategi penyelesaian yang baik dalam meningkatkan capaian program.
5. Puskesmas harus berperan aktif dalam menyampaikan usulan kebutuhan tenaga sesuai dengan jenis tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan untuk

menghilangkan masih adanya kondisi rangkap tugas atau beban ganda dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi.

6. Puskesmas mengadakan sosialisasi kepada petugas kesehatan mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap masing-masing indikator dan mampu melaksanakan langkah dan strategi yang ditetapkan dalam pelayanan.
7. Peningkatan kemampuan petugas perlu dimasukkan dalam kegiatan berkala tahunan untuk memperbaharui ilmu dan keterampilan seluruh SDM sehingga setiap petugas memiliki kompetensi, dan pemahaman yang baik.
8. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu meningkatkan edukasi yang lebih optimal secara konsisten dan berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyakit yang dideritanya.
9. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu inovasi dan kreasi tentang metode promosi kesehatan untuk merubah pola edukasi yang disukai masyarakat.

